

MAKALAH
Depresiasi Rupiah dalam Perspektif Teori Nilai Tukar Islam

Disusun untuk memenuhi tugas
Mata Kuliah : Ekonomi Makro Islam
Dosen Pengampu : Difi Dahliana, M.E.I.



Disusun oleh :
Kelompok 4

Fatmawarti Annisa : 180105020230
Lidia Sari : 180105020232
Mujalipah : 180105020246
Lili Rahmawati : 180105020280
Muhammad Lutfi : 180105020289

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI S1 PERBANKAN SYARIAH
2020

PENDAHULUAN

Dalam Islam semua tindakan termasuk keputusan perencanaan dan desain dievaluasi dengan mempertimbangkan kemanfaatan sosial (*masalih*) dan kerugiannya (*mafasid*) terhadap kehidupan sosial. Aspek-aspek yang harus dipertimbangkan adalah:

1. Masalahah al-Dharuriyah

Maslahah al-Dharuriyah adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting kemaslahatan ini, apabila luput dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan pemeliharaan terhadap harta.

2. Masalahah al-Hajiyah

Maslahah al-Hajiyah adalah suatu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi.

3. Masalahah al-Tahsiniyah

Maslahah al-Tahsiniyah adalah kemaslahatan yang bersifat pelengkap dan keluasan bagi daruriyat dan hajiyat, yang bertujuan untuk mengakomodasikan kebiasaan dan perilaku baik serta budi pekerti luhur.

Seluruh aspek tersebut harus dipertimbangkan untuk mencapai sebesar mungkin kemanfaatan sosial. Sumber-sumber yang menyangkut kehidupan orang banyak seperti air, hutan, mineral dan kehidupan alamiah tidak dapat dimiliki perseorangan atau dimonopoli, tetapi dimiliki oleh publik untuk penggunaan dan keadilan bersama. Oleh karenanya dalam tahapan operasional tata guna lahan secara Islami, negara sebagai wakil seluruh masyarakat, ditunjuk sebagai pengelola maupun pelindung sumber-sumber publik tersebut, mencakup semua kehidupan alamiah dan tata guna lahan alamiah (*mawat*), tata kepemilikan lahan (*amiriyah*), pajak untuk tujuan sosial (*awqaf*) dan lahan-lahan untuk tujuan rekreatif (*harim*).

Selanjutnya tata guna lahan di bawah aturan hukum Islam dapat dibagi menjadi empat kategori yaitu :

1. Mulk : lahan yang dimiliki secara individual dengan hak kepemilikan secara penuh.
2. Miri : lahan yang dimiliki oleh negara dengan status hak pakai bagi penggunaanya.
3. Waqf : lahan publik, umumnya dimiliki oleh lembaga keagamaan.
4. Musha : lahan yang dimiliki secara kolektif dan berkaitan dengan tanah adat.¹

Perekonomian Indonesia beberapa pekan terakhir publik dalam negeri mulai resah dengan pergerakan mata uang rupiah yang secara bertahap terus terdepresiasi terhadap dollar amerika, bahkan minggu ini sejak tahun 1998 untuk pertama kalinya nilai tukar rupiah terhadap dollar jatuh hingga ke titik Rp14.000,- kemudian pertanyaan yang mengemuka adalah, apa penyebab hal ini terjadi? Siapa yang harus bertanggung jawab dan bagaimana penyelesaiannya?.

Pelemahan rupiah terhadap dolar menjadi komoditi yang laku diperjual belikan di media masa kita beberapa pekan terakhir, sering kali beberapa talkshow maupun diskusi publik yang diadakan menjadi sekedar alat penyalur syahwat dan fantasi sekelompok orang untuk saling menyalahkan. Bagi oposisi, isu ini dijadikan amunisi untuk memojokan buruknya kinerja pemerintahan Jokowi-JK, ada pula yang berpendapat ini buah dari kegagalan pemerintahan SBY yang tidak dapat menata fundamental ekonomi negara kita dengan benar. Dan bagi sekelompok penikmat fantasi, ini adalah kesempatan baik untuk mengatakan bahwa “ini adalah konspirasi wahyudi, mamarika dan remason. Dan ketiga mainstream diatas

¹ Rusdiyah Rusdiyah, Difi Dahliana, and Dessy Maulina, 'Tinjauan Islam Terhadap Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Atas Tata Guna Lahan (Land Use) Kota Banjarmasin', *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 7, no. 2 (15 January 2017): 167, <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v7i2.2013>.

tampaknya tidak ada yang salah, karena ekonomi itu sendiri adalah ilmu sosial yang scientific, kuantitatif, terukur, tetapi disisi lain juga melibatkan fantasi, spekulasi dan kelabilan.

Anjloknya nilai rupiah tentu sangat berbahaya bagi perekonomian Indonesia, termasuk kestabilan sosial negeri ini. Sebab, beberapa pengamat menilai, jika sampai menyentuh 15.000 per dollar AS, maka dikhawatirkan krisis 1998 akan terulang. Akibat anjloknya nilai tukar rupiah dan kelemahan dalam mempertahankan stabilitas mata uang ini, pengamat pasar uang, Fariat Anwar, sempat menyatakan bahwa rupiah masuk ke dalam daftar uang sampah di dunia ini. Adapun dampak negatif pelemahan rupiah bagi perekonomian Indonesia, diantaranya adalah:

1. Biaya impor menjadi semakin mahal.
2. Beban utang valas pemerintah dan swasta semakin tinggi. Setiap depresi Rp 100 per dollar AS, biaya bunga utang negara naik Rp 207 miliar, atau Rp 2 triliun jika rupiah melemah Rp 1.000. Sedangkan korporasi, dimana 80% pengutang vallas tidak menggunakan hedging (lindung nilai), sudah harus bersiap gulung tikar jika nilai tukar rupiah terus melemah.
3. Harga barang-barang impor dan barang yang mengandung bahan baku impor meningkat (imported inflation).
4. Beban APBN juga semakin besar karena sebagian utang harus dibayar dengan dolar dan sebagian belanja barang dan modal juga berasal dari impor. Pelemahan Rp 100 saja dari asumsi yang dipatok pada APBN akan menambah belanja langsung hingga Rp 2,5 triliun. Jadi, jika rupiah melemah Rp 1.000, maka negara mengalami defisit anggaran sebesar Rp 9 triliun - Rp 12 triliun.

Karena desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah mewacanakan solusi kebijakan atasi pelemahan rupiah tersebut, yaitu:

1. Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) atau tax allowance bagi perusahaan yang menahan dividennya dan melakukan reinvestasi.

2. Bea masuk anti-dumping untuk impor.
3. Pembebasan visa bagi wisatawan asing.
4. Kewajiban pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) sebanyak 15 persen untuk Solar.
5. Kewajiban menggunakan letter of credit (L/C) untuk produk-produk sumber daya alam.
6. Pembentukan perusahaan reasuransi domestik.

Berdasarkan hal tersebut, 6 langkah kebijakan pemerintah mengatasi masalah ekonomi dan pelemahan rupiah, tidak akan menjadi solusi, yang ada malah menambah masalah baru. Bagaimana ekonomi Islam memberikan solusi dalam menyoroti masalah melemahnya nilai tukar rupiah?.²

² '274219-Uang-Dalam-Prespektif-Ekonomi-Islam-Depr-9613976d.Pdf', 80–81, accessed 19 February 2020, <https://media.neliti.com/media/publications/274219-uang-dalam-prespektif-ekonomi-islam-depr-9613976d.pdf>.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kurs dan Depresiasi Mata Uang

Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Apabila nilai tukar didefinisikan sebagai nilai Rupiah dalam valuta asing dapat diformulasikan sebagai berikut:

$NT_{IDR/USD}$ = Rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 dolar Amerika (USD)

$NT_{IDR/YEN}$ = Rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 Yen Jepang

Dalam hal ini, apabila NT meningkat maka berarti Rupiah mengalami **depresiasi**, sedangkan apabila NT menurun maka Rupiah mengalami **apresiasi**. Sementara untuk sesuatu negara menerapkan sistem nilai tukar tetap, perubahan nilai tukar dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Kebijakan suatu negara secara resmi menaikkan nilai mata uangnya terhadap mata uang asing disebut dengan **revaluasi**, sementara kebijakan menurunkan nilai mata uang terhadap mata uang asing tersebut **devaluasi**.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian

tersebut diberikan contoh sebagai berikut. Misalnya, nilai tukar satu dolar Amerika (USD) terhadap mata uang Rupiah sebesar Rp 8.500. Apabila nilai tukar satu USD berubah menjadi Rp 9.000, maka nilai tukar rupiah mengalami penurunan atau depresiasi. Sebaliknya apabila nilai tukar 1 USD berubah menjadi sebesar Rp 8.000, maka nilai tukar rupiah mengalami peningkatan atau apresiasi. Apabila nilai tukar didefinisikan sebagai nilai valuta asing terhadap Rupiah.

$NT_{USD/IDR}$ = dolar Amerika yang diperlukan untuk membeli satu Rupiah

$NT_{YEN/IDR}$ = Yen yang diperlukan untuk membeli satu Rupiah

Dengan menggunakan konsep ini, apabila NT meningkat, maka Rupiah mengalami **apresiasi** untuk sistem nilai tukar mengambang bebas atau **revaluasi** untuk sistem nilai tukar tetap, sedangkan apabila NT menurun, maka Rupiah mengalami **depresiasi** untuk sistem nilai tukar mengambang bebas atau **devaluasi** untuk sistem nilai tukar tetap.

Nilai tukar yang kita kenal dalam pengertian sehari-hari sebagaimana diuraikan di atas adalah dalam pengertian nominal (nilai tukar nominal). Dalam menganalisis nilai tukar kita juga mengenal apa yang disebut sebagai nilai tukar riil. Nilai tukar riil adalah nilai tukar nominal yang sudah dikoreksi dengan harga relatif, yaitu harga-harga di dalam negeri dibanding dengan harga-harga di luar negeri. Nilai tukar riil tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus sederhana sebagai berikut:

$$Q = S P / P^*$$

dimana Q adalah nilai tukar riil, S adalah nilai tukar nominal, P adalah tingkat harga di dalam negeri dan P^* adalah tingkat harga di luar negeri.

Formula di atas digunakan untuk menghitung nilai tukar riil bilateral dari dua negara. Dalam transaksi perdagangan internasional, suatu

negara tidak hanya melakukan transaksi pada satu negara, tetapi juga dengan beberapa negara. Dengan demikian, pengukuran nilai tukar riil suatu negara terhadap mitra dagangnya perlu juga disesuaikan dengan memperhitungkan laju inflasi dan nilai tukar dari masing-masing negara tersebut. Pengukuran rata-rata nilai tukar suatu mata uang riil terhadap seluruh atau sejumlah mata uang asing disebut sebagai nilai tukar efektif.

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar

Dalam sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar atau Kurs dapat berubah-ubah setiap saat, tergantung pada jumlah penawaran dan permintaan valuta asing relatif terhadap mata uang domestik. Setiap perubahan dalam penawaran dan permintaan dari suatu mata uang akan mempengaruhi nilai tukar mata uang yang bersangkutan. Dalam hal permintaan terhadap valuta asing relatif terhadap mata uang domestik meningkat, maka nilai mata uang domestik akan menurun. Sebaliknya jika permintaan terhadap valuta asing menurun, maka nilai mata uang domestik meningkat. Sementara itu, jika penawaran valuta asing meningkat relatif terhadap mata uang domestik, maka nilai tukar mata uang domestik meningkat. Sebaliknya jika penawaran menurun, maka nilai tukar mata uang domestik menurun.

Gambar 1

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Domestik



Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi permintaan valuta asing (Gambar 1).

1. Faktor pembayaran impor

Semakin tinggi impor barang dan jasa, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga nilai tukar akan cenderung melemah. Sebaliknya, jika impor menurun, maka permintaan valuta asing menurun sehingga mendorong menguatnya nilai tukar.

2. Faktor aliran modal keluar (*capital outflow*)

Semakin besar aliran modal keluar, maka semakin besar permintaan valuta asing dan pada lanjutannya akan memperlemah nilai tukar. Aliran modal keluar meliputi pembayaran hutang penduduk Indonesia (baik swasta dan pemerintah) kepada pihak asing dan penempatan dana penduduk Indonesia ke luar negeri.

3. Kegiatan spekulasi

Semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang dilakukan oleh spekulan maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing

sehingga memperlemah nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing.

Penawaran valuta asing dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu:

1. Faktor penerimaan hasil ekspor

Semakin besar volume penerimaan ekspor barang dan jasa, maka semakin besar jumlah valuta asing yang dimiliki oleh suatu negara dan pada lanjutannya nilai tukar terhadap mata uang asing cenderung menguat atau apresiasi. Sebaliknya, jika ekspor menurun, maka jumlah valuta asing yang dimiliki semakin menurun sehingga nilai tukar juga cenderung mengalami depresiasi.

2. Faktor aliran modal masuk (*capital inflow*)

Semakin besar aliran modal masuk, maka nilai tukar akan cenderung semakin menguat. Aliran modal masuk tersebut dapat berupa penerimaan hutang luar negeri, penempatan dana jangka pendek oleh pihak asing (*Portfolio investment*) dan investasi langsung pihak asing (*foreign direct investment*).

Besarnya aliran modal terutama dipengaruhi oleh perbedaan suku bunga dalam dan luar negeri (*interest rate differential*). Semakin tinggi perbedaan suku bunga di dalam negeri dibandingkan suku bunga luar negeri, maka semakin besar kecenderungan aliran modal masuk ke suatu negara. Namun dalam perkembangannya, ukuran yang digunakan oleh investor untuk menempatkan dananya tidak terbatas pada suku bunga nominal, tetapi suku bunga riil. Dalam suku bunga riil tersebut, suku bunga nominal telah dikoreksi dengan laju inflasi. Selain itu, tingkat resiko juga mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan dana di suatu negara. Negara yang mempunyai resiko penanaman yang tinggi, pada umumnya cenderung dihindari investor.

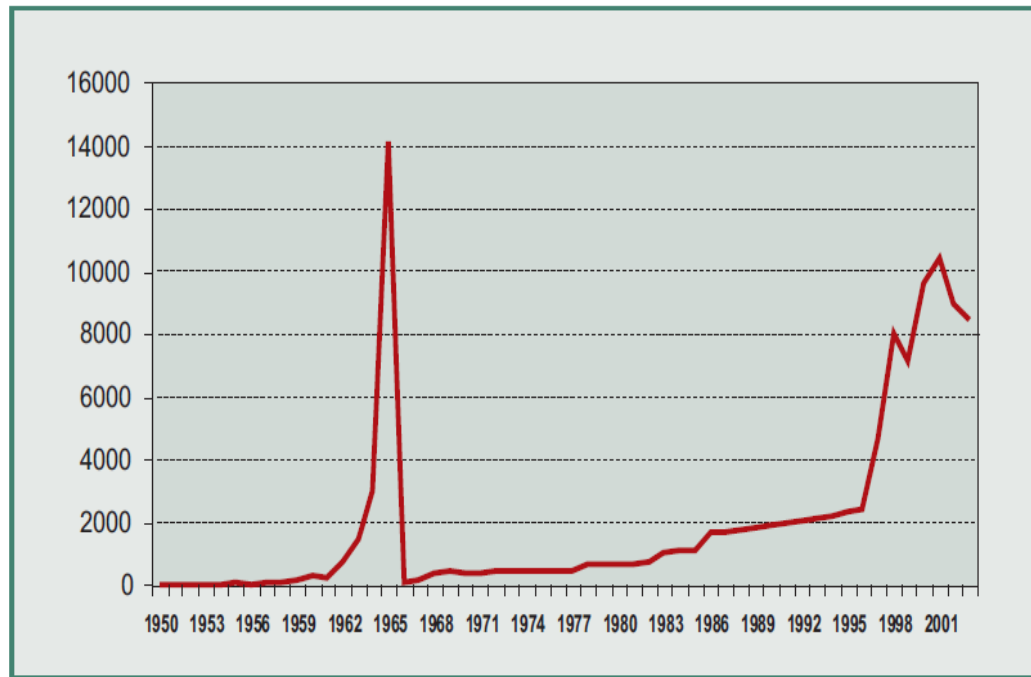
Perkembangan Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar di Indonesia

Tujuan kebijakan nilai tukar lainnya yang tidak kalah penting adalah

mendukung kesinambungan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan neraca perdagangan. Menjaga keseimbangan nilai tukar dalam rangka mendukung neraca perdagangan perlu dipelihara karena nilai tukar yang *over valued* dapat mengakibatkan neraca perdagangan menjadi memburuk dan merugikan perekonomian nasional.

Sejak kemerdekaan, pada prinsipnya tujuan kebijakan nilai tukar tidak jauh berbeda dari dua hal pokok di atas. Sebelum *diberlakukannya Undang Undang No. 23 tahun 1999* dan diperbarui dengan *Undang Undang No. 3 tahun 2004*, tujuan kebijakan nilai tukar lebih banyak ditekankan pada menunjang keseimbangan neraca pembayaran. Sementara sejak undangundang tersebut diberlakukan, tujuan kebijakan nilai tukar lebih ditekankan pada menunjang efektivitas kebijakan moneter. Dengan tercapainya tujuan akhir kebijakan moneter berupa inflasi yang stabil dan rendah, maka secara tidak langsung akan mendukung keseimbangan neraca pembayaran dan perekonomian nasional.

Grafik 1
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah 1950-2003



Sumber: IFS dan Bank Indonesia

Sejalan dengan tujuan kebijakan nilai tukar maka sistem dan kebijakan nilai tukar di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang. Bangsa Indonesia telah mengenal uang jauh sebelum masa kemerdekaan. Namun, mengingat keterbatasan menggali sejarah nilai tukar pada masa lalu, maka pembahasan sejarah nilai tukar di Indonesia dimulai sejak kemerdekaan hingga akhir tahun 2003. Dalam rangka mempermudah penganalisisan, periode pembahasan dibagi atas lima (lampiran), yaitu:

1. Periode perjuangan kemerdekaan (1945-1959).
2. Periode ekonomi terpimpin (1959-1966).
3. Periode stabilisasi, rehabilitasi dan pembangunan ekonomi (1966-1983).
4. Periode deregulasi ekonomi (1983-1997).
5. Periode pada saat dan setelah krisis.

Kebijakan Nilai Tukar pada Periode Perjuangan Kemerdekaan (1945-1959)

Pembahasan nilai tukar sejak kemerdekaan ini tidak hanya difokuskan

pada nilai tukar, tetapi juga aspek lainnya yang mempengaruhi nilai tukar, seperti kebijakan devisa dan perkembangan ekonomi. Sejarah nilai tukar pada periode ini diawali dari tahun 1945 hingga tahun 1953, ketika Pemerintah menerapkan sistem nilai tukar tetap dengan menetapkan nilai tukar rupiah sebesar tertentu terhadap mata uang asing atau mata uang lokal lainnya. Penetapan Rupiah terhadap mata uang lokal lainnya tersebut disebabkan banyaknya mata uang lokal yang digunakan sebagai alat pembayaran sehingga diperlukan nilai penukaran antarmata uang guna mempermudah transaksi. Sebagai langkah awal pada 6 Maret 1945, 1 Rupiah Jepang disamakan dengan 3 sen *Netherlands Indie Civil Administration* (NICA) sebagai pengganti uang Jepang di daerah yang diduduki sekutu.

Sementara itu, sebagai pewujudan negara merdeka, pemerintah mengeluarkan uang baru yang disebut Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) sebagai pengganti uang Jepang yang masih berlaku. ORI ditandatangani oleh Menteri Keuangan A.A. Maramis pada 17 Oktober 1945 dan mulai diedarkan pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada 23 Oktober 1949, 1 Rupiah ORI di luar Jawa dan Madura disamakan dengan Rp. 100. Khusus di Jawa dan Madura kurs penukaran adalah 5:1. Sementara uang yang berlaku sebagai alat pembayaran di Indonesia pada periode tersebut tidak hanya terbatas pada ORI, tetapi beragam jenisnya, seperti uang kertas DJB, uang Hindia Belanda dan uang NICA.

Perang pada periode perjuangan telah merusak stabilitas ekonomi ditandai dengan gangguan di bidang produksi, distribusi, perdagangan, dan bidang ekonomi lainnya. Selain itu, besarnya kebutuhan pembiayaan untuk perang mengakibatkan pemerintah mencetak uang dalam jumlah yang besar dan kebijaksanaan tersebut pada gilirannya mengakibatkan inflasi meningkat tajam dan nilai tukar Indonesia dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan mata uang asing lainnya. Nilai tukar yang *over valued* ini menjadi salah satu penyebab utama penurunan ekspor dan

pada lanjutannya mengakibatkan terjadinya krisis devisa. Sebagai satu langkah untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut, dari sisi kebijakan nilai tukar, pemerintah pada 7 Maret 1946 mendevaluasi nilai tukar Rupiah sebesar 29,12% dari Rp. 1,88 per USD menjadi Rp. 2,6 per USD.

Dalam upaya mengatasi tingginya laju inflasi, pemerintah melakukan pengetatan moneter dengan menggunting (Gunting Sjarifudin) uang *De Javasche Bank* (DJB), uang Hindia Belanda dan uang NICA pada 19 Maret 1950. Uang kertas bagian kanan ditukar dengan obligasi pemerintah, sementara uang kertas bagian kiri dengan nilai di atas f2,50 diakui sebagai alat pembayaran sah. Dengan pengguntingan ini, nilai mata uang tersebut hanya $\frac{1}{2}$ dari nilai nominalnya. Selain itu, untuk penyeragaman mata uang, ORI ditarik kembali dari peredaran pada Maret 1950.

Pada sisi kebijakan devisa, pada 12 Maret 1950 pemerintah menetapkan sertifikat devisa untuk mendapatkan hak membeli devisa. Perorangan atau perusahaan pemegang sertifikat dapat membeli devisa dari bank devisa untuk membiayai kegiatan impor, dengan kurs resmi sebesar Rp. 3,80 per USD. Sementara itu, dalam transaksi devisa, Pemerintah Indonesia menetapkan nilai tukar yang berbeda antara penghasil dan pemakai devisa atau sering disebut dengan *multiple exchange rate system*. Dalam sistem ini, nilai tukar bagi penghasil devisa adalah sebesar 200% dari kurs resmi dan bagi pemakai devisa sebesar 300%. Sistem nilai tukar ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah yang berasal dari selisih kurs guna menutupi defisit keuangan negara. Sistem sertifikasi devisa dihapus sejak 4 Januari 1952 dan hanya satu kurs resmi yang berlaku bagi kegiatan ekspor maupun impor, yaitu sebesar Rp. 3,80 per USD.

Pembiayaan defisit pemerintah melalui pencetakan uang mengakibatkan nilai tukar terus merosot dan *over valued* sehingga ekspor menurun. Penurunan ekspor tersebut menjadi salah faktor utama

yang menyebabkan penurunan devisa sejak pertengahan tahun 1951. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah kembali mendevaluasi nilai tukar rupiah pada Februari 1952 sebesar 66,7%, yaitu dari sebesar Rp. 3,80 menjadi Rp. 11,40 per USD. Selanjutnya pada 20 Juni 1957, pemerintah menerapkan sistem nilai tukar mengambang pada pelaku ekonomi tertentu, misalnya, hanya pemegang izin impor yang dapat membeli devisa. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan ekspor sehingga kegiatan impor dapat dihidupkan kembali dan kegiatan di daerah perkebunan sebagai salah satu penyumbang utama barang-barang ekspor dapat ditingkatkan.

Kebijakan Nilai Tukar Pada Periode Ekonomi Terpimpin (1959-1966)

Periode ekonomi pada masa ini sering dinamakan sebagai periode ekonomi terpimpin ketika semua unsur bangsa berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan revolusi. Pada masa ini, perekonomian Indonesia menghadapi masalah yang lebih berat dibandingkan dengan periode perjuangan kemerdekaan sebagai akibat dari kebijakan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan politik dibandingkan dengan kepentingan ekonomi. Perekonomian pada periode ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, inflasi yang membumbung tinggi (635% pada tahun 1966), dan investasi merosot tajam. Sementara itu, kebijakan devisa yang ketat menghambat perdagangan dan lalu lintas modal internasional, serta menciptakan pasar gelap dan kegiatan spekulasi valuta asing.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi yang memburuk dan inflasi yang tinggi tersebut, nilai tukar rupiah riil merosot terus sebagaimana terjadi periode kemerdekaan. Perkembangan tersebut mengakibatkan nilai rupiah yang ditetapkan dengan sistem nilai tukar tetap menjadi *over-valued*. Untuk mengatasi semua permasalahan tersebut, dari sisi kebijakan moneter, pemerintah melakukan sanering uang pada 25

Agustus 1959 dengan menurunkan nilai uang pecahan Rp500 dan Rp1000 menjadi Rp50 dan Rp100. Selain itu, dari sisi kebijakan nilai tukar, pemerintah kembali melakukan devaluasi nilai tukar rupiah sebesar 74,7% dari Rp.11,40 per USD menjadi Rp.45 per USD. Selanjutnya, pada 13 Desember 1965, pemerintah menerbitkan uang rupiah baru dengan nilai diperkecil, yaitu Rp1000 uang lama sama dengan Rp1 uang baru. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak kenaikan harga dari defisit pengeluaran pemerintah.

Kebijakan Nilai Tukar pada Periode Stabilisasi, Rehabilitasi dan Pembangunan Ekonomi (1966-1983)

Kondisi perekonomian pada periode ini diwarnai dengan inflasi yang sangat tinggi. Sejalan dengan kondisi ekonomi tersebut, kebijakan ekonomi kabinet Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) diarahkan pada program stabilisasi dan rehabilitasi, ekonomi. Program tersebut berhasil menekan laju inflasi dari 635% pada tahun 1965 menjadi 85,10% pada tahun 1968, dan sebesar 9,90% pada tahun 1969. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan ekspor pada tahun 1967 pemerintah mengganti sistem bukti ekspor dengan *multiple exchange rate system* menjadi sistem bonus ekspor dengan sistem nilai tukar mengambang. Dalam sistem bonus ekspor tersebut devisa hasil ekspor dapat diperdagangkan di pasar bebas.

Sejalan dengan pencapaian stabilitas moneter tersebut, mulai tahun 1969 pemerintah membuat rencana pembangunan dalam lima tahun (Repelita). Dalam Repelita, disusun program-program pembangunan termasuk di dalamnya kebijakan nilai tukar sebagai bagian dari kebijakan moneter. Dari sisi kebijakan nilai tukar dan devisa, pada Agustus 1971 pemerintah memberlakukan sistem devisa bebas dan mendevaluasi nilai tukar Rupiah sebesar 9,8% dari Rp378 per USD menjadi Rp415 per USD. Devaluasi tersebut dilakukan untuk memperbaiki neraca pembayaran

melalui perbaikan ekspor.

Laju inflasi Indonesia yang cenderung lebih besar dibandingkan negara-negara mitra dagang utama pada tahun 1970-an mengakibatkan nilai tukar rupiah *over-valued*. Nilai tukar yang cenderung *over-valued* dapat mengganggu ekspor karena harga-harga barang ekspor lebih mahal dibandingkan negara pesaing. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mendevaluasi nilai tukar rupiah sebesar 33,6% dari Rp415 per USD menjadi Rp625 per USD pada 15 November 1978 (Knop 15). Sejalan dengan kebijakan devaluasi tersebut, sistem nilai tukar yang digunakan juga diubah menjadi sistem nilai tukar mengambang terkendali. Dalam sistem ini, nilai tukar rupiah diambangkan dengan sekeranjang mata uang mitra dagang utama. Secara harian ditetapkan kurs indikasi dan dibiarkan bergerak pada kisaran kurs tertentu. Pemerintah akan melakukan intervensi apabila nilai tukar bergerak melebihi batas atas atau batas bawah yang ditetapkan. Kebijakan Knop 15 tersebut berhasil meningkatkan perolehan devisa hasil ekspor.

Kebijakan Nilai Tukar Periode Deregulasi Ekonomi (1983-1996)

Sebagaimana periode sebelumnya, perekonomian Indonesia pada periode deregulasi ekonomi menghadapi masa pasang surut. Pada awal periode ini (tahun 1982/83), perekonomian Indonesia menghadapi tekanan berat terutama disebabkan oleh menurunnya harga minyak di pasar dunia dan berlanjutnya resesi ekonomi dunia. Pada masa tersebut, perekonomian diwarnai dengan pertumbuhan ekonomi menurun tajam dan defisit neraca pembayaran yang semakin membesar. Selain itu, tingginya laju inflasi dibandingkan dengan beberapa negara pesaing dan mitra dagang utama Indonesia mengakibatkan nilai tukar rupiah *over-valued* dan menurunkan daya saing barang ekspor Indonesia di luar negeri. Dalam rangka meningkatkan daya saing barang-barang ekspor, kebijakan nilai tukar yang dilakukan adalah mendevaluasi kembali nilai

tukar Rupiah pada 30 Maret 1983 sebesar 38,1% dari Rp. 702,50 menjadi Rp 970 per USD. Selanjutnya, pada September 1986 Pemerintah kembali mendevaluasi nilai tukar rupiah sebesar 45% dari sebesar Rp1.134 per USD menjadi sebesar Rp1.644 USD.

Deregulasi sektor moneter, keuangan, dan perbankan tahun 1988 (Pakto 1988) telah berhasil meningkatkan arus modal masuk asing ke Indonesia. Arus modal masuk tersebut tidak terbatas pada arus modal jangka panjang, tetapi juga arus modal jangka pendek. Arus balik modal jangka pendek dapat berbahaya bagi perekonomian nasional jika Pemerintah tidak mempunyai cadangan devisa yang cukup untuk mempertahankan sistem nilai tukar mengambang terkendali. Untuk menghindari dampak negatif dari arus modal jangka pendek tersebut, sejak tahun 1992 dilakukan penyesuaian kebijakan nilai tukar dengan cara memperlebar pita intervensi. Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah dana jangka pendek dipergunakan untuk spekulasi di pasar valuta asing dalam negeri. Kebijakan pelebaran pita intervensi dilakukan dengan pelebaran pita intervensi nilai tukar rupiah sebesar Rp 6 pada tahun 1992. Pelebaran *band* intervensi dilakukan masing-masing sebanyak dua kali pada tahun 1994, 1995 dan 1996, dengan pelebaran band pada bulan September 1996 dari sebesar R118 (5%) menjadi Rp192 (8%). Pelebaran tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong perkembangan pasar valuta asing dan mengurangi ketergantungan permintaan valas terhadap Bank Indonesia.

Bersamaan dengan kebijakan tersebut, sistem nilai tukar mengambang terkendali disempurnakan pada 29 Desember 1995 dengan menerapkan penggunaan batas kurs intervensi di samping kurs konversi. Penetapan batas kurs intervensi dimaksudkan sebagai batas bagi bank untuk membeli atau menjual USD dari Bank Indonesia. Jika kurs rupiah lebih tinggi dari batas atas intervensi, bank dapat membeli USD dari Bank Indonesia. Sebaliknya, dapat menjual USD kepada Bank Indonesia apabila

kurs rupiah lebih rendah dari batas bawah intervensi.

Kebijakan Nilai Tukar pada Periode Saat dan Setelah Krisis Ekonomi dan Moneter (1997- 2003)

Krisis nilai tukar yang dialami oleh *Bath* Thailand pada pertengahan tahun 1997 telah menyebar dengan cepat ke negara-negara Asia, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Korea. Untuk mencegah terjadinya penularan dari krisis nilai tukar negara tetangga tersebut, Bank Indonesia melakukan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi terjadinya serangan terhadap nilai tukar rupiah. Kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia tersebut meliputi kebijakan pelebaran rentang intervensi (*spread*) dan intervensi pasar valuta asing. Sebagai langkah pertama, pada 11 Juli 1997, Bank Indonesia memperlebar rentang intervensi nilai tukar dari 8% menjadi 12% dengan batas bawah Rp 2.374 dan batas atas Rp 2.678. Kebijakan ini ditempuh untuk memberi keleluasaan pada pelaku pasar dalam menentukan kurs rupiah dan mengurangi intervensi Bank Indonesia di pasar valas. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan kebijakan moneter yang ketat dan intervensi di pasar valuta asing untuk meredam melemahnya nilai tukar rupiah. Untuk mengurangi permintaan terhadap valuta asing maka transaksi forward jual rupiah antara bank dengan nonresident dibatasi menjadi hanya USD lima juta per nasabah.

Berbagai kebijakan nilai tukar tersebut ternyata tidak mampu meredam depresiasi lebih lanjut terhadap nilai tukar rupiah. Intervensi pasar valuta asing Bank Indonesia hanya memberikan dampak yang sangat marginal, sementara cadangan devisa mulai menurun akibat kebijakan ini. Dalam rangka mencegah terkuras habisnya cadangan devisa, maka Pemerintah pada tanggal 14 Agustus 1997 mengambil kebijakan untuk mengembangkan rupiah dengan menganut sistem nilai tukar mengambang bebas. Kebijakan ini sama seperti yang dilakukan negara-negara tetangga, seperti Thailand mengembangkan nilai tukar *bath*

sesuai mekanisme pasar pada tanggal 2 Juli 1997 dan Philipina mengembangkan *peso* pada tanggal 11 Juli 1997. Penerapan sistem nilai tukar mengambang ini mengakibatkan nilai tukar rupiah melemah lebih lanjut. Bahkan hanya dalam jangka waktu 4 bulan setelah ditetapkan sistem nilai tukar mengambang, rupiah melemah hingga sebesar 53,2% dari sebesar Rp3.035 per satu dolar Amerika (USD) pada akhir Agustus 1997 menjadi sebesar Rp4.650 pada akhir Desember 1997, dan bahkan pada akhir Januari 1998 nilai tukar anjlok menjadi Rp10.375.

Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut terutama disebabkan tingginya arus modal keluar dan peningkatan kegiatan spekulasi terhadap rupiah. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan beberapa permasalahan di dalam negeri, seperti kerusuhan sosial dan ketidakstabilan politik. Kuatnya pengaruh ketidakstabilan sosial dan politik terhadap perkembangan nilai tukar tercermin dari pergerakan nilai tukar sejalan dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik di dalam negeri. Sebagai gambaran pada saat terjadinya kerusuhan sosial pada Mei 1998, nilai tukar rupiah melemah hingga mencapai sebesar Rp10.525 per satu USD dibandingkan dengan kurs bulan sebelumnya yang hanya sebesar Rp7.970 per satu USD.

Krisis nilai tukar dengan disertai gejolak sosial di dalam negeri tersebut telah mengakibatkan meroketnya laju inflasi dan kontraksi ekonomi yang sangat dalam pada tahun 1998¹⁰. Namun, sejalan dengan perkembangan ekonomi yang semakin membaik, stabilitas moneter dapat terjaga, serta tidak terdapat gejolak sosial yang berarti, perkembangan nilai tukar rupiah pada tahun 2003 cenderung stabil dan menguat.³

B. Teori Nilai Tukar Uang dalam Ekonomi Islam

³ <https://www.bi.go.id/id/publikasi/seri-kebanksentralaan/Documents/12.%20Sistem%20dan%20Nilai%20kebijakan%20Nilai%20Tukar.pdf>

Nilai tukar suatu mata uang di dalam Islam juga digolongkan dalam dua kelompok yaitu:

1) Natural.

2) Human Error.

Dalam pembahasan nilai tukar islam akan dipakai dua skenario yaitu:

a. Skenario 1 : terjadi perubahan harga di dalam negeri yang memengaruhi nilai

tukar uang (faktor luar negeri dianggap tidak berubah/ berpengaruh).

▪ *Natural Exchange Rate Fluctuation*

✓ *Fluktuasi* nilai tukar uang akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada Permintaan Agregatif (AD) : Sama seperti pembahasan pada bagian inflasi, ekspansi AD akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan.

✓ Fluktuasi nilai tukar uang akibat perubahan-perubahan yang terjadi pada Penawaran Agregatif (AS) : Jika AS mengalami kontraksi, maka akan berakibat pada naiknya tingkat harga secara keseluruhan yang kemudian akan mengakibatkan melemahnya (depresiasi). Sebaliknya, jika AS mengalami ekspansi maka akan berakibat pada turunnya tingkat harga secara keseluruhan yang akan mengakibatkan menguatnya (apresiasi) nilai tukar.

▪ *Human Error Exchange Rate Fluctuation*

✓ *Corruption dan Bad Administration* : korupsi dan administrasi yang buruk akan mengakibatkan naiknya harga akibat terjadinya *misallocation of resources* serta *mark-up* yang tinggi, yang harus dilakukan oleh produsen untuk menutupi 'biaya-biaya siluman' dalam proses produksinya.

✓ *Excessive tax* : pajak penjualan yang sangat tinggi yang dikenakan pada barang dan jasa akan meningkatkan harga jual

dari barang dan jasa tersebut. Secara agregatif, tingkat harga akan mengalami kenaikan, tingkat pajak yang sangat tinggi akan mengakibatkan melemahnya depresiasi nilai tukar uang.

- ✓ *Excessive Seignorage* : pencetak *full-bodied money* atau 100 % *reserve money* tidak akan mengakibatkan terjadinya inflasi. Akan tetapi, jika uang yang dicetak selain dari kedua jenis itu maka akan menyebabkan kenaikan tingkat harga secara umum. Efek yang ditimbulkan oleh pencetakan uang berlebihan adalah kenaikan tingkat harga secara keseluruhan atau inflasi.

b. Skenario 2 : terjadi perubahan-perubahan harga di luar negeri (faktor di dalam

negeri dianggap tidak berubah/ berpengaruh).

Ada dua sebab yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga luar negeri yaitu:

1. *Non –Engineered/Non-Manipulated Changes*:

Karena perubahan yang terjadi bukan disebabkan oleh manipulasi (untuk merugikan) yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Jika BI menambah IDR dengan mencetaknya, maka hal ini disebut *unsterilized intervention* (intervensi yang tidak steril), sedangkan jika IDR ditambah dengan menjual aset lain disebut dengan *sterilized intervention* (intervensi steril). Intervensi hanya dilakukan sampai batas nilai tukar awal (sebelum terjadinya perubahan-perubahan), atau istilahnya '*original supporting level*'.

Kenaikan harga-harga di luar negeri akan mengakibatkan melemahnya depresiasi nilai tukar uang asing terhadap mata uang domestik yang lebih lanjut akan mengakibatkan harga barang-barang luar negeri lebih kompetitif jika dibandingkan harga barang-barang dalam negeri.

2. *Engineered/Manipulated Changes* :

Karena perubahan yang terjadi disebabkan oleh manipulasi

yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang dimaksudkan untuk merugikan pihak lain. Misalnya para *fund manager* di Singapura melepas IDR yang dimilikinya sehingga terjadi 'banjir rupiah' yang mengakibatkan nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi secara tiba-tiba atau drastic di luar perkiraan BI.

Tindakan para *fund manager* Singapura menimbun IDR untuk dilepaskan saat tertentu untuk mengambil keuntungan dari fluktuasi nilai tukar IDR merupakan tindakan yang dilarang oleh Islam yaitu:

Pertama, termasuk dalam kategori *ikhtikar* (rekayasa penawaran untuk mengambil keuntungan di atas keuntungan normal tanpa adanya rekayasa). Apabila hal ini terjadi, mengambil analogi dari pemikiran ibn Taimiyah, pemerintah seharusnya menetapkan sistem nilai tukar dipagu secara temporer (sementara) untuk mencegah tindakan-tindakan yang merugikan tersebut.

Kedua, ketika para *fund manager* di Singapura melakukan manipulasi terhadap permintaan IDR, misalnya melalui mekanisme *forward transaction* yang dikombinasikan dengan *margin trading*, sehingga seakan-akan permintaan IDR menurun drastic di mana selanjutnya para *fund manager* itu kemudian mengambil keuntungan dari fluktuasi nilai tukar IDR tersebut. Hal ini pun dilarang dalam Islam yaitu termasuk dalam kategori *ba'i najasy* (rekayasa permintaan untuk mengambil keuntungan di atas keuntungan normal tanpa adanya rekayasa).

Untuk mengatasi *ba'i najasy* ini Bank Indonesia juga harus menetapkan *supporting level*-nya sampai aksi-aksi merugikan fund managers tersebut usai.⁴

C. Depresiasi Rupiah Selama Tahun 2019

⁴ Adiwarman a. Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2007).

KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA

MATA UANG AUD

[Grafik Time Series](#)

Nilai	Kurs Jual	Kurs Beli	Tanggal
1.00	9,789.14	9,688.97	31 Des 2019
1.00	9,803.30	9,704.37	30 Des 2019
1.00	9,747.92	9,649.53	27 Des 2019
1.00	9,735.16	9,634.12	26 Des 2019
1.00	9,707.09	9,609.11	23 Des 2019
1.00	9,699.23	9,601.33	20 Des 2019
1.00	9,658.57	9,561.08	19 Des 2019
1.00	9,631.51	9,534.28	18 Des 2019
1.00	9,674.29	9,576.64	17 Des 2019
1.00	9,684.33	9,586.58	16 Des 2019
1.00	9,726.73	9,622.99	13 Des 2019
1.00	9,717.67	9,619.58	12 Des 2019
1.00	9,603.01	9,500.48	11 Des 2019
1.00	9,621.00	9,523.88	10 Des 2019
1.00	9,631.27	9,528.46	09 Des 2019
1.00	9,654.96	9,557.49	06 Des 2019
1.00	9,699.83	9,600.51	05 Des 2019
1.00	9,705.55	9,607.57	04 Des 2019
1.00	9,683.42	9,585.66	03 Des 2019
1.00	9,616.91	9,519.82	02 Des 2019
1.00	9,590.54	9,493.71	29 Nop 2019

1.00	9,591.33	9,494.50	28 Nop 2019
1.00	9,616.21	9,519.12	27 Nop 2019
1.00	9,590.41	9,493.58	26 Nop 2019
1.00	9,629.79	9,531.17	25 Nop 2019
1.00	9,624.60	9,527.43	22 Nop 2019
1.00	9,639.89	9,541.16	21 Nop 2019
1.00	9,665.06	9,566.09	20 Nop 2019
1.00	9,621.30	9,522.76	19 Nop 2019
1.00	9,644.32	9,545.56	18 Nop 2019
1.00	9,604.86	9,506.49	15 Nop 2019
1.00	9,633.16	9,535.90	14 Nop 2019
1.00	9,674.59	9,576.92	13 Nop 2019
1.00	9,658.79	9,561.28	12 Nop 2019
1.00	9,669.72	9,572.11	11 Nop 2019
1.00	9,693.99	9,596.14	08 Nop 2019
1.00	9,695.12	9,597.25	07 Nop 2019
1.00	9,692.91	9,595.07	06 Nop 2019
1.00	9,707.24	9,609.25	05 Nop 2019
1.00	9,737.83	9,638.15	04 Nop 2019
1.00	9,766.79	9,668.21	01 Nop 2019
1.00	9,749.04	9,650.64	31 Okt 2019
1.00	9,685.18	9,587.41	30 Okt 2019
1.00	9,657.23	9,559.74	29 Okt 2019
1.00	9,605.86	9,508.89	28 Okt 2019
1.00	9,629.71	9,531.10	25 Okt 2019
1.00	9,639.42	9,542.11	24 Okt 2019
1.00	9,663.17	9,560.04	23 Okt 2019

1.00	9,711.79	9,612.35	22 Okt 2019
1.00	9,748.71	9,650.30	21 Okt 2019
1.00	9,707.33	9,607.92	18 Okt 2019
1.00	9,669.48	9,571.85	17 Okt 2019
1.00	9,604.14	9,505.76	16 Okt 2019
1.00	9,633.43	9,536.17	15 Okt 2019
1.00	9,628.15	9,529.54	14 Okt 2019
1.00	9,625.85	9,526.85	11 Okt 2019
1.00	9,601.05	9,502.42	10 Okt 2019
1.00	9,610.80	9,512.23	09 Okt 2019
1.00	9,608.40	9,511.19	08 Okt 2019
1.00	9,608.92	9,508.78	07 Okt 2019
1.00	9,600.41	9,503.04	04 Okt 2019
1.00	9,579.70	9,482.92	03 Okt 2019
1.00	9,589.10	9,492.32	02 Okt 2019
1.00	9,610.25	9,513.19	01 Okt 2019
1.00	9,636.74	9,533.63	30 Sep 2019
1.00	9,638.03	9,540.70	27 Sep 2019
1.00	9,617.24	9,518.47	26 Sep 2019
1.00	9,653.72	9,555.81	25 Sep 2019
1.00	9,596.66	9,499.04	24 Sep 2019
1.00	9,588.84	9,486.94	23 Sep 2019
1.00	9,608.41	9,511.98	20 Sep 2019
1.00	9,625.00	9,528.50	19 Sep 2019
1.00	9,694.17	9,595.45	18 Sep 2019
1.00	9,700.05	9,600.04	17 Sep 2019
1.00	9,681.24	9,582.26	16 Sep 2019

1.00	9,633.14	9,535.56	13 Sep 2019
1.00	9,700.40	9,602.84	12 Sep 2019
1.00	9,693.82	9,595.00	11 Sep 2019
1.00	9,667.65	9,568.87	10 Sep 2019
1.00	9,705.22	9,607.87	09 Sep 2019
1.00	9,681.95	9,583.80	06 Sep 2019
1.00	9,706.46	9,606.74	05 Sep 2019
1.00	9,686.51	9,587.42	04 Sep 2019
1.00	9,574.39	9,477.82	03 Sep 2019
1.00	9,599.08	9,500.68	02 Sep 2019
1.00	9,607.82	9,509.64	30 Agust 2019
1.00	9,642.16	9,539.49	29 Agust 2019
1.00	9,671.15	9,572.50	28 Agust 2019
1.00	9,679.44	9,580.53	27 Agust 2019
1.00	9,651.17	9,552.71	26 Agust 2019
1.00	9,680.32	9,581.49	23 Agust 2019
1.00	9,691.64	9,592.60	22 Agust 2019
1.00	9,718.61	9,620.88	21 Agust 2019
1.00	9,720.64	9,617.24	20 Agust 2019
1.00	9,674.92	9,575.84	19 Agust 2019
1.00	9,717.93	9,618.79	16 Agust 2019
1.00	9,742.26	9,643.13	15 Agust 2019
1.00	9,713.10	9,613.84	14 Agust 2019
1.00	9,709.05	9,610.15	13 Agust 2019
1.00	9,709.31	9,610.00	12 Agust 2019
1.00	9,718.00	9,618.44	09 Agust 2019
1.00	9,685.31	9,586.32	08 Agust 2019

1.00	9,646.25	9,549.35	07 Agust 2019
1.00	9,769.72	9,670.71	06 Agust 2019
1.00	9,678.16	9,579.24	05 Agust 2019
1.00	9,720.59	9,622.48	02 Agust 2019
1.00	9,716.41	9,617.60	01 Agust 2019
1.00	9,700.87	9,603.12	31 Jul 2019
1.00	9,741.63	9,643.54	30 Jul 2019
1.00	9,732.10	9,628.36	29 Jul 2019
1.00	9,772.31	9,673.69	26 Jul 2019
1.00	9,816.71	9,716.15	25 Jul 2019
1.00	9,828.54	9,729.42	24 Jul 2019
1.00	9,869.42	9,768.25	23 Jul 2019
1.00	9,880.64	9,780.67	22 Jul 2019
1.00	9,884.58	9,784.23	19 Jul 2019
1.00	9,864.51	9,764.79	18 Jul 2019
1.00	9,828.72	9,729.18	17 Jul 2019
1.00	9,844.08	9,742.84	16 Jul 2019
1.00	9,871.52	9,771.70	15 Jul 2019
1.00	9,891.51	9,790.88	12 Jul 2019
1.00	9,860.33	9,761.43	11 Jul 2019
1.00	9,843.74	9,742.64	10 Jul 2019
1.00	9,884.62	9,782.96	09 Jul 2019
1.00	9,932.69	9,830.68	08 Jul 2019
1.00	9,988.85	9,887.68	05 Jul 2019
1.00	9,977.77	9,875.03	04 Jul 2019
1.00	9,950.32	9,849.62	03 Jul 2019
1.00	9,913.59	9,813.13	02 Jul 2019

1.00	9,935.86	9,835.01	01 Jul 2019
1.00	9,955.51	9,853.22	28 Jun 2019
1.00	9,971.42	9,869.25	27 Jun 2019
1.00	9,924.49	9,818.51	26 Jun 2019
1.00	9,897.99	9,796.26	25 Jun 2019
1.00	9,896.87	9,796.74	24 Jun 2019
1.00	9,834.43	9,734.59	21 Jun 2019
1.00	9,856.09	9,751.19	20 Jun 2019
1.00	9,864.43	9,763.92	19 Jun 2019
1.00	9,859.47	9,759.49	18 Jun 2019
1.00	9,919.58	9,819.08	17 Jun 2019
1.00	9,919.44	9,818.66	14 Jun 2019
1.00	9,916.80	9,817.19	13 Jun 2019
1.00	9,944.84	9,843.29	12 Jun 2019
1.00	9,971.55	9,869.90	11 Jun 2019
1.00	9,987.09	9,885.10	10 Jun 2019
1.00	9,995.57	9,894.58	31 Mei 2019
1.00	10,040.88	9,933.91	29 Mei 2019
1.00	10,003.67	9,898.27	28 Mei 2019
1.00	10,008.59	9,905.87	27 Mei 2019
1.00	10,001.99	9,895.63	24 Mei 2019
1.00	10,022.04	9,915.95	23 Mei 2019
1.00	10,018.74	9,918.21	22 Mei 2019
1.00	10,048.81	9,942.05	21 Mei 2019
1.00	10,059.87	9,957.43	20 Mei 2019
1.00	10,030.38	9,923.85	17 Mei 2019
1.00	10,048.95	9,947.92	16 Mei 2019

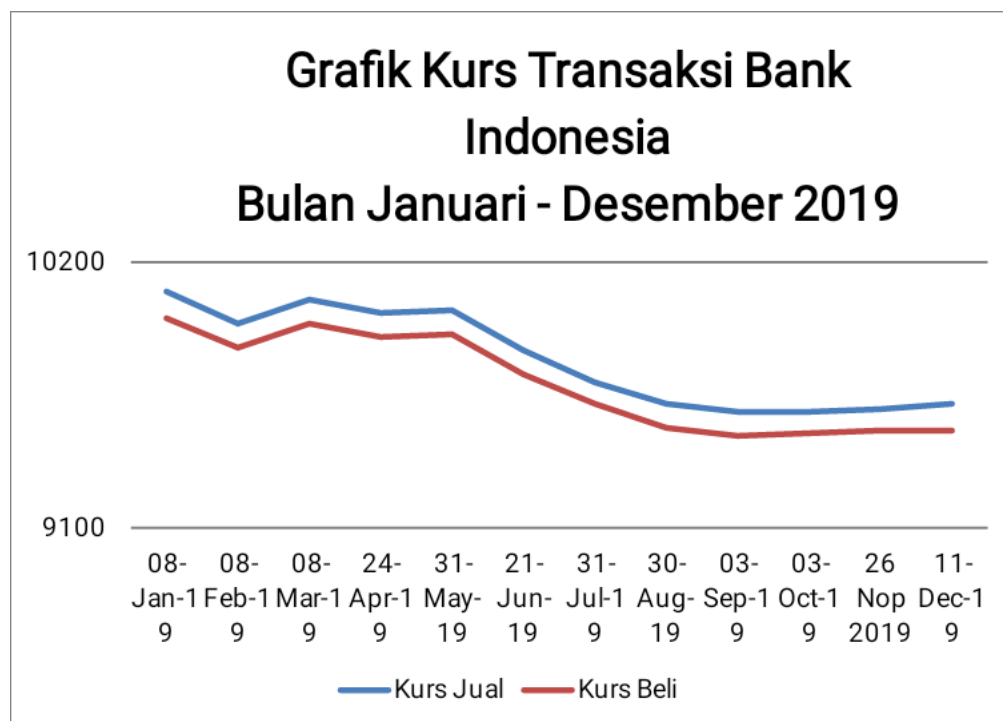
1.00	10,056.55	9,955.38	15 Mei 2019
1.00	10,100.23	9,997.16	14 Mei 2019
1.00	10,070.60	9,967.28	13 Mei 2019
1.00	10,107.72	10,003.92	10 Mei 2019
1.00	10,046.65	9,943.40	09 Mei 2019
1.00	10,091.22	9,988.72	08 Mei 2019
1.00	10,069.58	9,961.63	07 Mei 2019
1.00	10,030.05	9,926.76	06 Mei 2019
1.00	10,042.79	9,940.59	03 Mei 2019
1.00	10,055.56	9,954.40	02 Mei 2019
1.00	10,073.06	9,970.11	30 Apr 2019
1.00	10,058.30	9,956.72	29 Apr 2019
1.00	10,024.08	9,917.19	26 Apr 2019
1.00	9,988.80	9,886.27	25 Apr 2019
1.00	9,986.25	9,883.46	24 Apr 2019
1.00	10,087.54	9,986.33	23 Apr 2019
1.00	10,088.79	9,987.40	22 Apr 2019
1.00	10,113.75	10,011.83	18 Apr 2019
1.00	10,101.59	10,000.14	16 Apr 2019
1.00	10,144.71	10,042.85	15 Apr 2019
1.00	10,138.87	10,036.24	12 Apr 2019
1.00	10,189.38	10,084.86	11 Apr 2019
1.00	10,120.38	10,017.95	10 Apr 2019
1.00	10,131.04	10,028.47	09 Apr 2019
1.00	10,089.10	9,986.91	08 Apr 2019
1.00	10,135.32	10,032.76	05 Apr 2019
1.00	10,150.99	10,047.03	04 Apr 2019

1.00	10,168.70	10,066.36	02 Apr 2019
1.00	10,193.04	10,084.75	01 Apr 2019
1.00	10,149.34	10,047.24	29 Mar 2019
1.00	10,155.70	10,047.95	28 Mar 2019
1.00	10,142.39	10,038.66	27 Mar 2019
1.00	10,138.88	10,036.38	26 Mar 2019
1.00	10,113.01	10,009.71	25 Mar 2019
1.00	10,103.30	10,001.06	22 Mar 2019
1.00	10,153.54	10,049.00	21 Mar 2019
1.00	10,112.94	10,011.12	20 Mar 2019
1.00	10,159.44	10,051.47	19 Mar 2019
1.00	10,150.78	10,042.99	18 Mar 2019
1.00	10,186.77	10,081.93	15 Mar 2019
1.00	10,137.09	10,033.77	14 Mar 2019
1.00	10,112.57	10,011.01	13 Mar 2019
1.00	10,128.52	10,025.26	12 Mar 2019
1.00	10,127.59	10,024.86	11 Mar 2019
1.00	10,041.54	9,940.36	08 Mar 2019
1.00	10,030.88	9,927.76	06 Mar 2019
1.00	10,059.95	9,952.43	05 Mar 2019
1.00	10,079.14	9,975.67	04 Mar 2019
1.00	10,059.29	9,957.17	01 Mar 2019
1.00	10,090.25	9,988.89	28 Feb 2019
1.00	10,102.32	9,994.86	27 Feb 2019
1.00	10,066.96	9,963.94	26 Feb 2019
1.00	10,067.87	9,966.35	25 Feb 2019
1.00	10,042.96	9,942.19	22 Feb 2019

1.00	10,109.28	10,006.30	21 Feb 2019
1.00	10,136.10	10,034.24	20 Feb 2019
1.00	10,108.96	10,004.99	19 Feb 2019
1.00	10,143.64	10,040.64	18 Feb 2019
1.00	10,058.58	9,952.29	15 Feb 2019
1.00	10,058.56	9,957.73	14 Feb 2019
1.00	10,031.43	9,929.01	13 Feb 2019
1.00	10,029.53	9,928.95	12 Feb 2019
1.00	9,984.74	9,882.57	11 Feb 2019
1.00	9,937.62	9,837.29	08 Feb 2019
1.00	9,981.10	9,880.24	07 Feb 2019
1.00	10,057.20	9,953.97	06 Feb 2019
1.00	10,172.11	10,069.33	04 Feb 2019
1.00	10,176.37	10,073.56	01 Feb 2019
1.00	10,262.85	10,158.45	31 Jan 2019
1.00	10,201.83	10,096.88	30 Jan 2019
1.00	10,145.70	10,044.05	29 Jan 2019
1.00	10,152.12	10,044.39	28 Jan 2019
1.00	10,094.75	9,992.64	25 Jan 2019
1.00	10,137.42	10,034.72	24 Jan 2019
1.00	10,172.37	10,069.66	23 Jan 2019
1.00	10,223.07	10,120.08	22 Jan 2019
1.00	10,236.63	10,133.44	21 Jan 2019
1.00	10,262.16	10,157.10	18 Jan 2019
1.00	10,205.04	10,096.15	17 Jan 2019
1.00	10,240.58	10,135.54	16 Jan 2019
1.00	10,210.70	10,106.90	15 Jan 2019

1.00	10,179.14	10,075.43	14 Jan 2019
1.00	10,172.39	10,068.91	11 Jan 2019
1.00	10,140.71	10,037.66	10 Jan 2019
1.00	10,159.34	10,056.27	09 Jan 2019
1.00	10,072.34	9,965.36	08 Jan 2019
1.00	10,107.49	10,004.84	07 Jan 2019
1.00	10,124.24	10,020.30	04 Jan 2019
1.00	10,087.65	9,986.35	03 Jan 2019
1.00	10,190.44	10,082.30	02 Jan 2019

5



⁵ 'Kurs Transaksi BI - Bank Sentral Republik Indonesia', accessed 19 February 2020, <https://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx>.

D. Depresiasi Rupiah dari Sudut Pandang Teori Nilai Tukar Islam

Jauh sebelum resmi dipergunakan di dunia Islam, mata uang dinar (emas) dan dirham (perak) telah dikenal di zaman Nabi Yusuf AS. Peristiwanya terjadi ketika Nabi Yusuf dijual kepada raja Mesir oleh kafilah dagang dari Madyan. Sebagaimana diterangkan dalam Alquran surah Yusuf ayat 20 yang artinya : "Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah²⁶, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf". Ayat ini mengisyaratkan tingkat peradaban masyarakat Mesir pada waktu itu. Mereka sudah menggunakan dirham, yakni mata uang dari perak sebagai unit alat tukar dalam sistem perdagangan mereka.

Ashabul Kahfi merupakan salah satu dari kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Kisah ini disampaikan oleh Allah SWT dalam surah al-kahfi ayat 9-26. Pada ayat ke-19, dapat kita temukan kata "uang perak", berikut arti ayat tersebut: "Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun". (QS. al-Kahfi, 19).

Berkaitan dengan ayat ini, konon di suatu masa, terdapat tujuh pemuda beriman berikut seekor anjing pengawal mereka melakukan hijrah ke gua Al-Kahfi guna menghindari konflik dengan Raja yang zalim pada masa itu. Setelah sampai di gua, para pemuda yang kelelahan ini, dengan kekuasaan-Nya Allah menidurkan mereka selama tidak kurang

dari 300 tahun masehi atau 309 tahun hijriyah. Setelah terbangun kembali dari tidur dan merasakan lapar yang teramat sangat, maka salah seorang dari pemuda bertaqwa ini bersiap-siap ke kota untuk bertransaksi, yaitu membeli makanan dari uang perak (wariq) milik mereka.

Gua ashabul kahfi terletak di Amman Jordania, peristiwa itu terjadi pada masa pemerintahan raja Dekyanus (Decius) tahun 249-251 M. Dari ayat tersebut terungkaplah fakta bahwa pada masa itu manusia sudah menggunakan uang perak sebagai alat tukar.⁶

Ketika sistem moneter dunia menggunakan sistem emas, keadaan saat itu stabil dan jarang krisis. Namun, tatkala sistem moneter internasional diganti dengan sistem pertukaran emas parsial (Bretton Woods), lalu diteruskan dengan uang kertas biasa semenjak 1971, dunia Internasional sangat rentan krisis moneter. Bahkan jika suatu negara mengalami krisis moneter, krisis itu cepat menjalar dan menyerang negara-negara lain (Contagion Effect).

Sistem mata uang kertas biasa, rentan terhadap krisis. Sebab, nilai mata uang di suatu negara terkait dengan nilai mata uang negara lain, termasuk sangat dipengaruhi kondisi politik dan ekonomi negara lain. Akibatnya, jika mata uang negara lain terkena krisis, krisis itu akan menjalar sangat cepat ke negara lain. Kita bisa menyaksikan, ketika krisis moneter menyerang Thailand, pada 1997/1998 lalu, maka dengan segera krisis ini menjalar hampir di seluruh negara Asia menjadi krisis multidimensional. Semua ini menunjukkan bahwa krisis moneter yang memukul dunia, lebih disebabkan oleh sistem moneternya yang sangat lemah. Kerusakan tatanan moneter Indonesia dan dunia secara umum, tentu membutuhkan solusi fundamental, bukan solusi tambal sulam. Islam sebagai agama sekaligus ideologi, telah memiliki solusi komprehensif atas segala persoalan manusia termasuk dalam masalah standar mata uang. Berdasarkan penggalan para ulama, Islam

⁶ Difi Dahliana, 'A. Perkembangan Sistem Transaksi', n.d., 11–12.

menetapkan bahwa mata uang yang wajib digunakan oleh negara adalah mata uang emas dan perak.

Mata uang emas dan perak memiliki keunggulan, sebagai berikut:

1. Pada saat mata uang kuat seperti dolar AS kehilangan kepercayaan pada saat krisis, orang tetap ramai-ramai memborong emas/perak. Pasalnya, emas dan perak adalah komoditi, sebagaimana komoditi lainnya, semisal: kambing, besi, atau tembaga.
2. Sistem emas dan perak mampu menjamin kestabilan moneter. Tidak seperti sistem uang kertas yang cenderung membawa instabilitas dunia karena penambahan uang kertas yang beredar secara tiba-tiba
3. Sistem emas dan perak mampu menciptakan keseimbangan neraca pembayaran antar-negara secara otomatis untuk mengoreksi ketekoran dalam pembayaran tanpa intervensi bank sentral. Mekanisme ini disebut dengan automatic adjustment (penyesuaian otomatis) yang akan bekerja menyelesaikan ketekoran dalam perdagangan (trade imbalance) antar negara.
4. Sistem emas dan perak mempunyai keunggulan sangat prima, yaitu berapapun kuantitasnya dalam satu negara, banyak atau sedikit, akan mencukupi kebutuhan pasar dalam pertukaran mata uang.
5. Sistem emas dan perak mempunyai kurs yang stabil antar negara.
6. Sistem emas dan perak akan memelihara kekayaan emas dan perak yang dimiliki oleh setiap negara. Itulah enam alasan bahwa sistem mata uang emas dan perak layak digunakan di dunia ini.

Dalam konteks negara Islam (Khilafah) jika kelak berdiri di nusantara setidaknya ada kebijakan yang bisa dilakukan (Zallum, 2004: 231-232), diantaranya:

1. Menghentikan pencetakan mata uang kertas.
2. Memberlakukan kembali mata uang emas dan perak dalam seluruh interaksi ekonomi.
3. Menghilangkan berbagai kendala pajak atau cukai yang berkaitan

dengan emas, serta menghilangkan syarat yang membatasi impor dan ekspor emas.

4. Menghilangkan beragam ketentuan yang menghalangi pemilikan emas, kontrol atas pergerakan emas, jual belinya, dan berinteraksi dengan menggunakan emas.
5. Menghilangkan beragam regulasi yang menghalangi pemilikan mata uang utama dunia, menciptakan persaingan bebas di antara mata uang, sehingga diperoleh harga yang stabil dengan mata uang lainnya dan terhadap mata uang emas, tanpa campur tangan dunia internasional untuk menaikkan turunkannya.⁷

8.

KESIMPULAN

Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Apabila nilai tukar didefinisikan sebagai nilai Rupiah dalam valuta asing dapat diformulasikan sebagai berikut:

⁷ '274219-Uang-Dalam-Prespektif-Ekonomi-Islam-Depr-9613976d.Pdf', 89–90.

NTIDR/USD = Rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 dolar Amerika (USD)

NTIDR/YEN = Rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 Yen Jepang

Dalam hal ini, apabila NT meningkat maka berarti Rupiah mengalami depresiasi, sedangkan apabila NT menurun maka Rupiah mengalami apresiasi. Nilai tukar suatu mata uang di dalam Islam juga digolongkan dalam dua kelompok yaitu: Natural dan Human Error.

Depresiasi rupiah selama tahun 2019 mengalami penurunan dari awal bulan Januari hingga akhir bulan Desember yang dapat dilihat pada gambar grafik kurs transaksi Bank Indonesia.

Pada saat sistem moneter internasional diganti dengan sistem pertukaran emas parsial (Bretton Woods), lalu diteruskan dengan uang kertas biasa semenjak 1971, dunia Internasional sangat rentan krisis moneter. Bahkan jika suatu negara mengalami krisis moneter, krisis itu cepat menjalar dan menyerang negara-negara lain (Contagion Effect).

DAFTAR PUSTAKA

- '274219-Uang-Dalam-Perspektif-Ekonomi-Islam-Depr-9613976d.Pdf'.
Accessed 19 February 2020.
<https://media.neliti.com/media/publications/274219-uang-dalam-perspektif-ekonomi-islam-depr-9613976d.pdf>.
Adiwarman a. Karim. *Ekonomi Makro Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2007.
Dahlia, Difi. 'A. Perkembangan Sistem Transaksi', n.d., 14.

'Kurs Transaksi BI - Bank Sentral Republik Indonesia'. Accessed 19 February 2020. <https://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx>.

Rusdiyah, Rusdiyah, Difi Dahliana, and Dessy Maulina. 'Tinjauan Islam Terhadap Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Atas Tata Guna Lahan (Land Use) Kota Banjarmasin'. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 7, no. 2 (15 January 2017): 163–74. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v7i2.2013>.

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/serikebanksentralan/Document/12.%20Sistem%20dan%20Nilai%20kebijakan%20Nilai%20Tukar.pdf>